

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna  
Mencapai Gelas Sarjana S.IP pada Program Studi Ilmu  
Pemerintahan*



**DISUSUN OLEH :  
PONCO WIJAK SONO  
NIM : 201810071**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Di Susun Oleh,

NAMA : PONCO WIJAK SONO  
NIM : 2018 10 071  
PROGRAM STUDY : ILMU PEMERINTAHAN

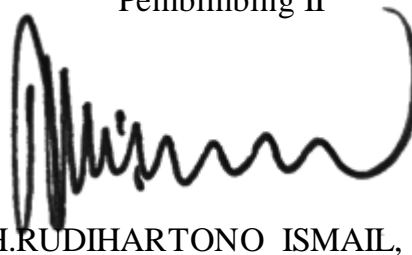
Telah di periksa dan di setujui  
Pada tanggal : 10 Desember 2021

Pembimbing I



Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si.  
NIDN. 1207086701

Pembimbing II



Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd.  
NIDN. 19700408 199702 1 002

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi



SAHRAIL ROBO, S.Sos., M.I.P  
NIDN. 1425108601

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

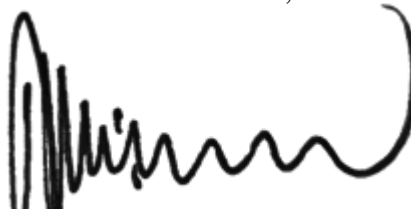
Ketua,



Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si.

NIDN. 1207086701

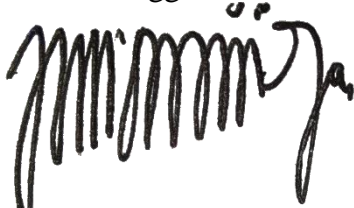
Sekretaris,



Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd.

NIDN. 19700408 199702 1 002

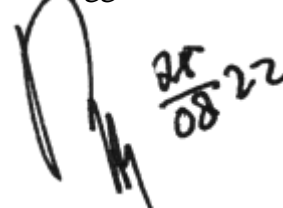
Anggota,



NURAINI, S.Sos., M.AP.

NIDN. 1422127401

Anggota,



BAMBANG SUPENO DOMI, S.Sos., M.Si.

NIDN. 1204076701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si.

NIDN. 1207086701

## KATA PENGANTAR

Dengan ini memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas Berkat, Rahmat, Hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Didalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

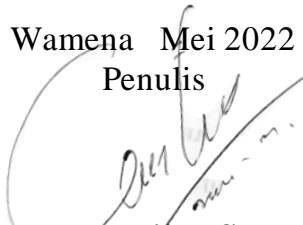
1. Bapak **Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
2. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
3. Bapak **Sahrail Robo, Sos., M.I.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** Dan Bapak **Sahrail Robo, S.Sos., M.I.P** selaku Dosen Pembimbing 1 Dan Pembimbing II, Yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu **Nuraini, S.sos., M.AP** selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi.
7. Orang tuanku tercinta Ayahanda **Huhammad Husni** dan Ibunda **Mas Adeh** yang telah membersarkan penulis serta kakakku **Hayatul Hidayat, S.Sos** , **Nurul Hayati, Apriliah Maisarah A.Md.Ak** serta Adikku **Nurfaisah** yang telah memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

8. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaanya selama penulis duduk di bangku kuliah.
9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan ini senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulis ini.

Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh tuhan yang maha esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca

Wamena Mei 2022  
Penulis



**Ponco Wijak Sono**  
**Nim. 201810071**

## ABSTRAKSI

**Ponco Wijak Sono. 201810071** \_\_\_\_\_ *“Implementasi Program Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Jayawijaya”* (Telly Nancy Silooy Dan Sahrail Robo).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Kartu Identitas Anak Di Masa Covid 19 Di Kabupaten Jayawijaya, Implementasi Kartu Identitas Anak merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang di laksanakan oleh para Implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang di mana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata. Informan pada penelitian ini sebanyak 11 orang sebagai informan. Data – data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya melalui indikator, yaitu 1. Hubungan organisasi, 2. Karakteristik dan kapabilitas 3. Sumber daya, 4. Faktor lingkungan menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari sosialisasi dan pencetakan Kartu Identitas Anak yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan pegawai yang kompeten yang di berpegang pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi dan sumber daya yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah faktor lingkungan yaitu, faktor social, faktor geografis, serta Wabah Covid 19.

***Kata Kunci : Implementasi, Program, kartu identitas Anak (KIA)***

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Teoritis.....	6
3. Kegunaan Praktis .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	8
2. Model Implementasi Kebijakan .....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	21

C. Definisi operasional.....	24
D. Alur Pikir Penelitian.....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>METODE DAN TEKNIK PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	27
B. Jenis penelitian.....	27
C. Sampel Sumber Data.....	27
D. Instrumen Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV.....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL PENELLITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Keadanaan Lokasi Penlitian.....	32
2. Keadaan Informan.....	50
3. Analisa Data.....	51
4. Pembahasan.....	60
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah KIA Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2021 .....	5
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4. 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 4. 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	46
Tabel 4. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Agama .....	47
Tabel 4. 5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	48
Tabel 4. 6 Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	49
Tabel 4. 7 Keadaan Infroman.....	50
Tabel 4. 8 Yang Mempunyai Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Alur Pikir .....	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya.....	38

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Implementasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik, Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu – individu, kelompok-kelompok, atau pejabat pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan ( Kasriati 2021).

Proses Implementasi Program KIA juga telah dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2021 yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya khususnya Kecamatan Wamena mengenai Kartu Identitas Anak, bagian kelima penerbitan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada penduduk Warga Negara Indoneisa dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 tahun (tujuh belas tahun) dan belum menikah, yang menjalankan program KIA adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA di Kabupaten Jayawijaya sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah - tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintahan, bahwa kartu yang berfungsi layaknya kartu tanda penduduk

(KTP) bagi anak di bawah 16 tahun kurang dari satu hari ini bisa digunakan untuk berbagai hal, dan atas nama sendiri.

Selain permasalahan kartu identitas anak nasional yang bersifat mendadak di Kabupaten Jayawijaya, hal lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak apat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak (KIA).

Jika membahas mengenai identitas, tanpa kartu identitas anak (KIA) pun si anak telah tercatat di kantor catatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki

kartu identitas. Pasal 1 ketentuan umum permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek kartu identitas anak (KIA) adalah Anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 16 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 16 tahun. Sebagai bentuk pemenuhan hak atas Identitas Anak. Dalam pelaksanaan KIA tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya itu sendiri melainkan juga tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pelayanan Kartu Identitas Anak (kasriati 2021)

Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Jayawijaya pada saat launching pada tanggal 22 November 2019 saat itu penerapan KIA sudah berjalan tetapi ada hambatan di tahun 2020 maka penerapan program KIA belum berjalan dengan sempurna, karena adanya Pandemi COVID-19 telah menyebar luas ke wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Jayawijaya. Penularan COVID-19 dari manusia ke manusia paling dominan terjadi melalui tetesan pernapasan atau sekresi individu, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan aturan mengenai pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, kegiatan di area publik, termasuk kegiatan ekonomi juga dibatasi, bukan hanya covid 19 yang menjadi penghambat melainkan sumber daya dana, sumber daya fasilitas, politik, konflik.

Perkembangan penerapan program KIA dapat dilihat dari jumlah KIA yang telah dimiliki anak di Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Jumlah KIA Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2021**

TAHUN	Anak 0-16 tahun			Jumlah KIA			%
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2019	32.751	28.937	61.668	23	21	44	0,07
2020	31.043	27.511	58.555	3.118	2.999	6.117	10,45
2021	29.070	25.976	55.046	3.893	3.692	7.585	13,78

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah anak yang telah memiliki KIA di tahun 2019 sebanyak 44 orang atau 0,07% dari jumlah anak secara keseluruhan sebanyak 61.668 orang dan di tahun 2020 jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 6.117 orang atau 10,45% dari jumlah anak secara keseluruhan 58.555 orang dan di tahun 2021 jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 7.585 orang atau 13,78 dari jumlah anak secara keseluruhan 55.046 orang.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Jayawijaya Menerbitkan sepuluh ribu blangko, kartu identitas anak (KIA) untuk tahap pertama tahun 2019. Agar terorganisir, Dukcapil Jayawijaya melakukan komunikasi dengan mengirim surat ke sekolah untuk pengambilan data dan kemudian mencetaknya. Hal ini dilakukan supaya ada keteraturan. Untuk tahap pertama, telah dilakukan pemotretan dan pencetakan KIA di Wamena Kota yang dimulai dari TK hingga SMA/SMK, dimana tahap selanjutnya akan dimulai awal tahun 2020 Namun, setelah diselidiki di masyarakat penyaluran kartu identitas anak (KIA) tersebut belum merata penyebarannya. Berdasarkan uraian di atas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk itu maka penulis ingin

memilih Judul “Implementasi Program Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Jayawijaya”.

## **2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian mengenai implementasi program kartu identitas anak dengan beberapa aspek antara lain : Hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, Karakteristik dan Kapabilitas pelaksana dan Kondisi lingkungan.

## **3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Program Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jayawijaya ?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Program KIA ?

## **4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jayawijaya.
- b) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat tentang program Kartu Identitas Anak.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Sumbagan dalam rangka ilmu pengetahuan tentang implementasi kartu identitas anak sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang implementasi program KIA di masa Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya.



### **3. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya khususnya dan pada umumnya dan pembuat kebijakan berkaitan dengan Kartu Identitas Anak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Implementasi Kebijakan**

###### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi yang dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengakapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Salusu berpendapat dalam buku “Pemahaman kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik” karya Mustari (2015, p. 139) mengatakan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk menyusul satu keputusan. Suatu keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Guna merealisasikan pencapaian tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi atau tahapan yang begitu penting dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Jones dalam Kusumanegara (2010, p. 138), tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek penting dari seluruh proses lahirnya kebijakan. Namun kebanyakan dari kita beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut. Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Grindle dalam Winarno (2012, p. 149), berpendapat secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dari pendapat lain yang diutarakan oleh Rippley dan Franklin dalam Wahab (2012, p. 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dunn dalam Mustari (2015, pp. 136–137), menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: *“policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical”*.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses kebijakan tersebut, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik administrasi. Hal ini pula menyangkut tujuan dari diadakannya sebuah kebijakan (*policy goals*). Dan jika dilihat dari beberapa konteks implementasi kebijakan maka hal tersebut berkaitan akan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan,

disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dari beberapa definisi yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- b. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- c. adanya hasil kegiatan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan

### A. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model klasik yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn. Pada model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik (Mustari, 2015, p. 150). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014, pp. 242–243) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber daya (dana atau insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
3. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran kerja agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif serta keberkaitan formal dan informal dengan pembuat kebijakan).
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat).

## **B. Mual atau Model Charles Jones**

Jones dalam Mustari (2015, pp. 155–156) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu:

1. Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan;
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
3. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa;

Model yang dikemukakan oleh Charles Jones mempunyai persamaan

dengan model yang dikemukakan oleh Jan Merse dan Warwick yang pada dasarnya juga menekankan pada faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Hanya saja pada model Jan Merse menambahkan isi kebijakan sebagai salah satu kunci sukses mengimplementasikan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012, p. 95).

## **C. Model Pressman dan Wildavsky**

Model dalam karya Pressman dan Wildavsky dalam Anggara (2014, pp. 238–239) adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan mereka yang berjudul *implementation* menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh karena itu, kerja sama, koordinasi, dan kontrol memegang peranan sangat penting. Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai implementasi, tingkat kerja sama antar departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan kerja sama dalam

rangkaian mata rantai tersebut yang defesit, akan menyebabkan kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis. Rumusan mereka mungkin berguna ketika policy implementasi tidak melibatkan banyak aktor dan berbagai tingkatan sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. Akan tetapi, rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antar aktor dari berbagai organisasi/departemen sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuannya. Pendekatan Game Theory mungkin lebih bisa dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk menganalisis implementasi. Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antar aktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan

membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.

#### **D. Model Edwards III**

Menurut Edward III dalam Agustino (2017, p. 136) implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output-outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan

karyawan, negosiasi dan lain-lain. Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

#### **E. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli**

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2008 : 147) juga menekankan bahwa Ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, Selanjutnya kedua ahli ini menegaskan bahwa kerangka konseptual ini dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis antara lain:

- 1) Hubungan antar organisasi yakni menyangkut pola-pola hubungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang meliputi; kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan anggaran, implementasi dan evaluasi, konsistensi dan kualitas komunikasi dan efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- 2) Sumberdaya organisasi yakni berhubungan dengan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang meliputi Kontrol terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program; ketepatan alokasi dana; pendapatan yang cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin politik pusat; dukungan pemimpin politik lokal dan komitmen birokrasi.
- 3) Karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yakni, menyangkut kemampuan dan karakter-karakter yang dimiliki oleh pelaksana dalam mengimplementasikan program, meliputi : Keterampilan teknis, manajerial petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol,

& mengintegrasikan keputusan; dukungan dan sumberdaya politik instansi; sifat komunikasi internal; hubungan antara instansi dengan kelompok sasaran; hubungan antara instansi dengan pihak di luar & NGO; kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program; kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

- 4) Kondisi lingkungan yakni berhubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang mendukung atau menghambat implementasi suatu program, meliputi : tipe sistem politik; struktur pembuatan kebijakan; karakteristik struktur politik local; kendala sumberdaya; sosio cultural; tingkat kepatuhan kelompok sasaran; tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan public tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi). Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan serta intensitas sikap).

### **3. Pandemi Wabah Covid 19**

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh daerah di dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional (Masrul, 2020).

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute



Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Berbagai macam rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh dunia. Rintangan yang cukup berat dan dalam jangka waktu cukup lama yang harus dilalui seluruh umat manusia yaitu pandemi Covid-19. Informasi pertama dari munculnya pandemi ini yaitu dari negara China. Menurut pemerintah China, awal mula virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini berasal dari pasar basah yang menjual berbagai macam hewan yang biasa dikonsumsi oleh orang China seperti tikus, kelelawar, dll (Handayani, 2020: 120). Informasi selanjutnya yaitu banyaknya kasus penularan yang terjadi, baik melalui kontak fisik antar orang maupun dengan benda mati. Penularan tersebut semakin merata antar negara disebabkan oleh beberapa orang yang pulang setelah berwisata dari China dan kembali pulang ke negaranya kemudian menularkan virus tersebut ke orang-orang di negaranya (Susilo, dkk. 2020: 45). Jadi, dapat diketahui bahwa awal mula virus corona yaitu berasal dari China, yang diidentifikasi penyebab utamanya yaitu dari hewan. Kemudian virus tersebut menyebar antar manusia, dan hampir seluruh negara di dunia terkontaminasi, termasuk Indonesia.

Covid-19 atau Corona Virus Disease-19 merupakan penyakit jenis baru yang muncul pertama kali di China. Covid-19 (Corona virus disease 19) adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus corona (Yuliana, 2020: 187). Virus corona merupakan virus jenis baru. Virus corona menyerang seluruh manusia tanpa melihat umur. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia dapat terserang virus corona. Gejala-gejala yang ditimbulkan setelah terserang virus corona bermacam-macam, diantaranya yaitu batuk, pilek, flu, demam, sesak nafas, bahkan

kematian, sedangkan beberapa orang yang terpapar tidak menunjukkan gejala (WHO, 2020: 1). Orang dewasa dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terserang virus corona (Handayani, dkk. 2020: 121). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak dan remaja juga dapat terserang virus corona ini. Hal ini juga disebabkan karena imun tubuh yang tidak kuat untuk menahan virus corona agar tidak berkembang biak di dalam tubuh. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa virus corona dapat menyerang seluruh manusia tanpa melihat batasan umur, dan gejala yang ditimbulkan juga beraneka ragam bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala apapun. Apabila orang yang sudah terkontaminasi oleh virus ini dan tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan kematian. Akibat dari adanya virus corona, terdapat kebijakan yang dibuat untuk masyarakat dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona Menurut Burhan (2020: 3), kebijakan tersebut yaitu cara menjaga jarak satu meter antar individu; menggunakan masker saat keluar rumah; cuci tangan menggunakan sabun; ketika bersin dan batuk segera menutup mulut menggunakan siku tangan atau tisu dan membuang tisu ke tempat tertutup kemudian segera mencuci tangan; menghindari menyentuh mulut; mata dan hidung sebelum cuci tangan; makan makanan yang sudah diolah dengan baik dan benar-benar matang; dan melaksanakan pola hidup sehat yang baik. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah penularan Covid-19.

#### **4. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terkait Pandemi Wabah Covid 19.**

Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan baru yang dikarenakan adanya Covid-19 ini. Hampir seluruh sektor yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup manusia memiliki kebijakan baru. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah terutama

oleh menteri-menteri yang bersangkutan di bidangnya, termasuk di sektor pendidikan. Di sector pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan beberapa surat edaran mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh sekolah pada masa pandemi Covid-19. Surat edaran tersebut diantaranya yaitu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 302/E.E2/KR/2020, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020.

- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 berisi tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19). Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Lembaga perguruan tinggi negeri / swasta, dan seluruh lembaga pendidikan. Didalam surat edaran ini menjelaskan bahwa seluruh pegawai, dosen, mahasiswa, guru, dan peserta didik harus mematuhi protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19; menunda kegiatan yang mengharuskan mengundang banyak peserta dan diganti dengan video conference atau aplikasi daring lainnya; seluruh pegawai, dosen, mahasiswa, guru, dan peserta didik melaksanakan kegiatan dari rumah; dan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan online untuk menyediakan sarana belajar online secara gratis baik melalui televisi maupun aplikasi online yang ditujukan untuk seluruh peserta didik maupun mahasiswa di seluruh Indonesia.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 302/E.E2/KR/2020 yang berisi tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan. Surat edaran ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Surat

Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 302/E.E2/KR/2020 ditujukan khusus kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Di dalam surat ini menjelaskan mengenai masa belajar mahasiswa, jadwal praktikum di laboratorium dan praktik lapangan, jadwal penelitian tugas akhir harus disesuaikan dengan status dan kondisi setempat, dan waktu penyelenggaraan periode semester genap disesuaikan dengan lingkungan masing-masing perguruan tinggi.

- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat edaran ini menganjurkan disediakannya sarana cuci tangan pakai sabun, adanya tissue, dan adanya handsinitizer di berbagai lokasi yang sering dikunjungi. Selalu membersihkan benda-benda yang sering dipakai atau dipegang oleh tangan, seperti komputer, mesin ketik, keyboard, dan handel pintu. Membatasi perjalanan baik keluar negeri maupun dalam negeri terutama ke daerah yang sudah terdampak Covid-19. Menyarankan pegawai untuk mengukur suhu badan, menghindari kontak fisik secara langsung, selalu memakai masker, dan membuat papan informasi mengenai pencegahan Covid-19. Didalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 ini juga terdapat lampiran tentang pencegahan Covid-19 berdasarkan tingkat resiko penyebaran. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian yaitu daerah yang tidak ada anggota masyarakat kabupaten / kota yang terjangkit virus, ada beberapa anggota masyarakat kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus, dan ada anggota masyarakat yang terkonfirmasi terjangkit virus di lingkungannya.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan pendidikan. Surat edaran ini ditujukan kepada kepala dinas Provinsi, Kabupaten / Kota, kepala lembaga layanan Pendidikan

tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Surat edaran ini memuat tentang mengoptimalkannya peran UKS dan unit pelayanan di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dengan tujuan pencegahan dan penanganan Covid-19. Disediakkannya tissue, handsinitizer, dan sarana cuci tangan memakai sabun di lokasi yang strategis. Melakukan pembersihan pada setiap ruangan dan benda-benda yang sering dipakai secara rutin. Memonitor kehadiran warga satuan pendidikan dan mengizinkan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Tidak memberlakukan sanksi kepada anggota yang izin tidak masuk dikarenakan sakit. Selalu mengingatkan anggota untuk menaati protokol kesehatan. Dan mengurangi jumlah orang yang berkunjung di satuan pendidikan.

- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Surat edaran ini mengatakan bahwa UN (Ujian Nasional) Tahun 2020 dibatalkan sehingga UN tidak menjadi syarat kelulusan lagi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Proses belajar dari rumah dilakukan oleh seluruh siswa dengan fokus pada Pendidikan kecakapan hidup sehingga siswa tidak terbebani dengan capaian ketuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. Kelulusan Sekolah Dasar ditentukan oleh 5 semester terakhir yang sudah dilalui (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganjil). Mengenai kenaikan kelas, guru dapat melaksanakan ujian akhir semester dalam bentuk portofolio, penugasan, dan tes melalui daring dengan menggunakan aplikasi online. Penerimaan peserta didik baru ditentukan berdasarkan nilai rapor dari lima semester

terakhir yang sudah dilalui. Dana BOS dan BOP dapat digunakan untuk keperluan sekolah selama pandemi Covid-19.

- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pedoman penyelenggaraan dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Di dalam surat edaran ini terdapat penjelasan mengenai tujuan, prinsip, metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah; panduan pelaksanaan belajar dari rumah; penyusunan program, kegiatan, dan anggaran belajar dari rumah; durasi waktu pelaksanaan kegiatan belajar; fasilitas pembelajaran online; panduan pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru, peserta didik, dan orang tua; dan panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ini merupakan payung hukum yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah.

## B. Penelitian Terdahulu

*Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Sulastini	Implementasi Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Lombok Timur	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik. Namun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA yang tidak stabil pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan sistem layanan yang belum maksimal, dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan.	Jurnal fakultas hukum universitas gunung rinjani. ISSN : 2722-242X ISSN : 2721-2653 Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
2	Windi Dwi Arista Wayan Suderana	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung	Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat dilaksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata	Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial e-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. 1, Februari 2019

			dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.	
3	Nur Rohman Endang Wirjatmi Tri Lestari Ely Sufianti	Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIA belum diimplementasikan secara maksimal di Kabupaten Purwakarta terbukti pencapaian penerbitan KIA masih dibawah 20%, untuk itu perlu strategi khusus untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut. Berdasarkan analisis dengan menggunakan SWOT bahwa strategi untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut adalah menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam hal pemanfaatan KIA tersebut selain itu untuk memudahkan masyarakat pengurusan KIA bisa dilakukan secara online.	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021
4	Maria Melcilin Irenes	Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan Kota Malang terkait	JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



	Emei Dwinanarhati Setiamandani		dengan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah baik dilihat dari standar pelayanan serta adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah DISPENDUK Kota Malang menjadikan pelayanan lebih baik dan berkualitas.	ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4 (2019)
5	Khaerul Umam Noer	Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak	Proses Penyusunan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Depok telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Depok yang direspon dengan positif oleh Walikota dan DPRD, kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan anak-anak di Kota Depok.  Untuk Formulasi Kebijakannya Pemerintah Kota Depok mendukung dan menyetujui usulan dari Disdukcapil memprioritaskan pelayanan administrasi kependudukan anak yang berkualitas sebagai salah satu program pendukung mewujudkan KLA. Kebijakan	Jurnal Ilmiah Indonesia p- ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 4, April 2021

			<p>ini juga mendapatkan respon dari masyarakat dalam pembuatan KIA, karena masyarakat merasa bahwa dengan adanya KIA yang berfungsi sebagai identitas bagi anak juga sebagai fasilitas terhadap beberapa sektor di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan perbankan.</p>	
--	--	--	--	--

### C. Definisi operasional

Dalam menganalisa implementasi KIA di Kabupaten Jayawijaya, maka penulis menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

Implementasi Program Kartu Identitas Anak adalah Proses penerapan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Jayawijaya untuk anak di bawah 16 tahun dan Indikatornya sebagai berikut :

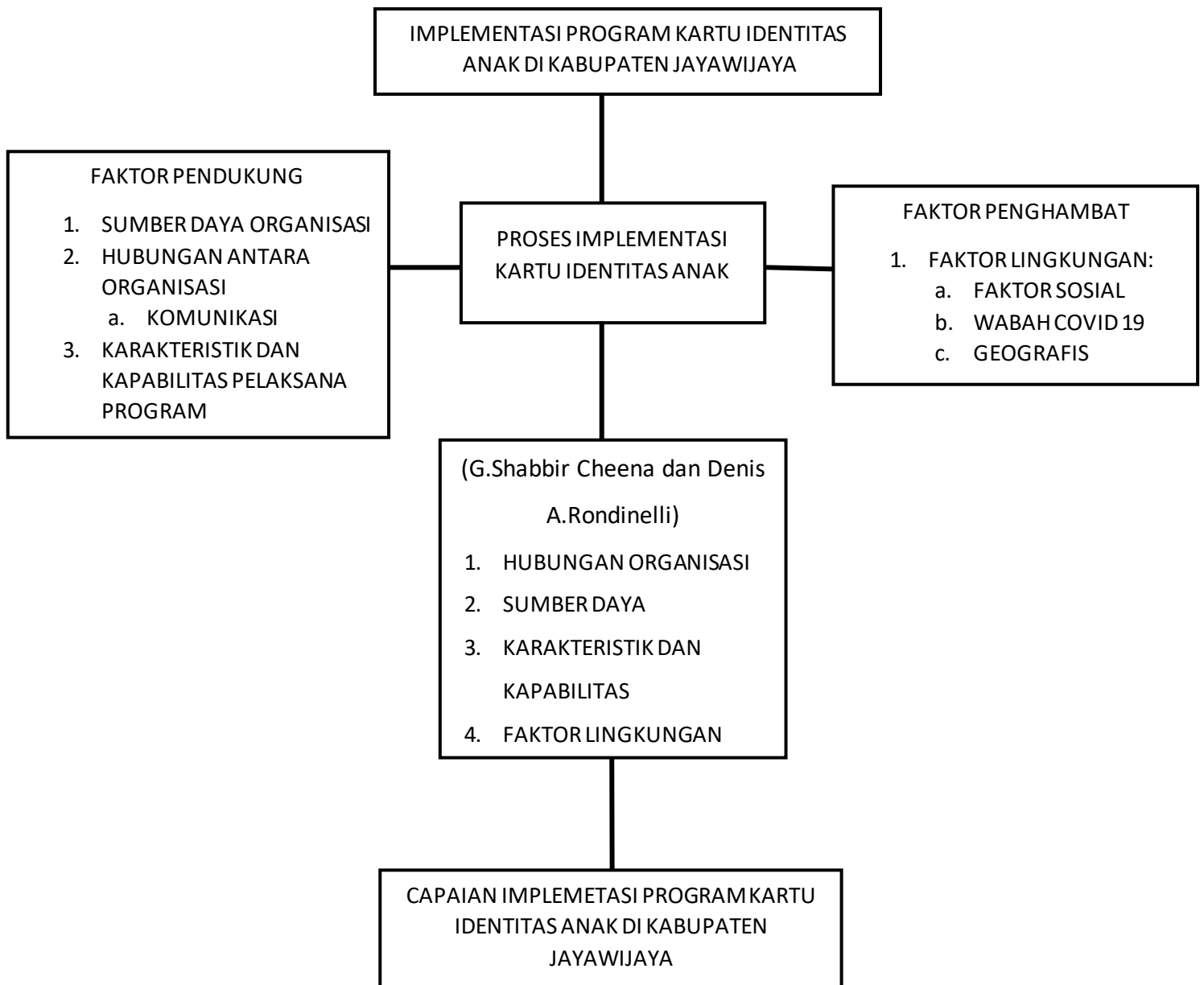
1. Hubungan antar organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten jayawijaya mengenai Kartu Identitas Anak telah melakukan hubungan yang cukup baik dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah turun langsung di sekolah-sekolah dasar melakukan pemahaman ke Guru dan siswa, sementara sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi melalui media sosial.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten jayawijaya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun sumber daya fasilitas sudah cukup memadai. Sumber daya manusia yang kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk

peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasilitas berupa alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai.

3. Karakteristik dan kapabilitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sudah cukup baik. Adapun komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target, serta diarahkannya untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan proses perekaman di sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak.
4. Kondisi lingkungan, yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya dalam implementasi program kartu identitas anak yakni berhubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan baik pemerintah pusat dan daerah yang mendukung atau menghambat implementasi program KIA seperti dimasa covid 19 dimana penerapan KIA terhambat di karenakan pemerintah pusat melakukan aturan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah indonesia tetapi dimasa covid 19 ada faktor yang mendukung dalam penerapan program KIA dengan melakukan komunikasi melalui media sosial.

## D. Alur Pikir Penelitian

**Gambar 2. 1 Alur Pikir**



## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan waktu penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jayawijaya. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang menangani pembuatan (KIA).

##### **2. Waktu penelitian**

Adapun waktu yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah selama  $\pm 1$  (satu) bulan.

#### **B. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Mulyana, 2008:151). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian ini teori mulai diperlukan tapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap hal yang diamati.

#### **C. Sampel Sumber Data**

Sampel sumber data dipilih secara Purposive dan bersifat Snowball sampling. Penentuan sampel sumber data, pada proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti dilapangan. sampel sumber data dipilih orang yang memiliki otoritas dan mampu memberikan informasi yang relevan dan lebih dalam tentang Objek yang diteliti. Sampel yang peneliti maksudkan adalah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu identitas anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berjumlah 11 orang.

**Tabel 3. 1 Informan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Disdukcapil	1 orang
2	Kabid PIAK	1 orang
3	Kasubag Keuangan	1 orang
4	Guru/operator	1 orang
5.	Avsec/ security bandara	1 orang
6	Masyarakat / orang tua	6 orang
<b>Total</b>		<b>11 Orang</b>

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama adalah peneliti sendiri. instrumen yang digunakan adalah pedoman Wawancara. Instrumen yang digunakan bisa bertambah pada saat pelaksanaan penelitian disebabkan karena ketepatan pemilihan informan dan kompleksitas permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

1. Observasi Partisipan Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, proses, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” Sulistyio-Basuki (2006:149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah

disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

## **2. Wawancara Mendalam**

Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Sulistyono-Basuki (2010:171)“ wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya”. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat perekam, peneliti akan meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung.

## **3. Dokumentasi**

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar dan juga berupa video rekaman sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006:173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara

mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan Miles dan Huberman (1992:16). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

### **2. Display Data (Penyajian data)**

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman (1992:17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah



penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:17), proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadanaan Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah kabupaten jayawijaya**

Kabupaten jayawijaya dibentuk berdasrakan undang-undang nomor 12 tahun 1969, tentang pembentukan provinsi otonom papua dan kabupaten – kabupaten otonom di provinsi papua (lembangan negara republic Indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan Lembaga negara republic indoensia nomor 207). Kabupaten jayawijaya adalah salah satu kabupaten di provinsi papua dengan ibu kota wamena yang terletak di lembah baliem, lembah baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut lembah baliem identic dengan jayawijaya atau wamena, dalam literatur asing lembah baliem juga sering disebut sebagai lembah agung.

Sejarah kabupaten jayawijaya sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini, karena daerah ini adalah daerah terisolir tertutup dengan dunia luar sampai pada tahun lima puluhan para misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjila di daerah ini yang tidak segaja ditemukan oleh Richard archbold sebagai ketua tim ekspedisi yang disponsori oleh American museum of natural history melihat lembah hijau luas dari kaca jendela pesawat pada tanggal 23 juni 1938.

Tim ekspedisi yang sama di bwaha pimpinan kapten teerink dan lernan van areken mendarat di danau habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah lembah baliem melalui lembah ibele dan mereka mendirikan basecamp di lembah baliem. Pada tanggal 20 april 1954. Sejumlah missionaris dari amerika termaksud di dalamnya, Dr. Myron Bromley, tiba di lemabah baliem.

Tim misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk menjadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah suku Mukoko, dan di areal inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang wamena saat ini. Pada tahun 1958, pemerintah belanda memulai kekuasannya di lembah baliem, dengan mendirikan pos pemerintah di sekitar area landasan terbang, namun kehadiran belanda di lembah baliem tidak lama, karena melalui proses Panjang diawali dengan ditandatangani dokumen pepera pada tahun 1969, irian barat kemabli ke pemrintah republic Indonesia, sehingga pemerintah belanda segera meninggalkan irian barat (papua),

**b. Sejarah singkat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya**

Sesuai keputusan mendagri nomor 54 tahun 1983 tanggal 27 oktober 1983 tentang organisasi dan tata kerja kanor catatan sipil kabupaten/kota ditindak lanjuti kaputusan bupati kepala daerah TK II jayawijaya no.50/B/KEP/JWW/1988 tentang pembentukan organisasasi dan tata kerja kantor catatan sipil kabupaten jay awijaya daerah TK. II jayawijaya awal:

Nomenklatur disdukcapil adalah “kantor catatan sipil” dan menajdi dinas “pendaftaran penduduk” kemudian menjadi dinas pencatatan sipil kabupaten jayawijaya. Yang berlandasan pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten jayawwijaya dan telah diubah dengan perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten jayawijaya, dinask kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jaywijaya mempunyai tugas membantu bupati, untuk

menyelenggarakan bidang administrasi kependudukan dan penacatan sipil.

**c. Visi misi**

Berdasarkan peraturan bupati kabupaten jayawijaya nomor 7 tahun 2008 dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan korrdinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Peyelenggaraan urusan kepedudukan dan catatan sipil serta palayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan PUT;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil terdapat visi misi yang dijadikan sebagai pedoman;

**1) Visi dan misi**

a) Visi

Visi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya “tercipta tertib administrasi kependudukan berbasis system-sistem informasi adminitrasi kependudukan (SIAK) melalui pelayanan Prima.

b) Misi

misi yang dimiliki oleh dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya “misi kantor dinas kependudukan kabupaten jayawijaya”

- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan serta pelayanan sipil;
- Menciptakan kondisi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan dalam rangka pelayanan kependudukan untuk mewujudkan pelayanan prima;
- Mempersiapkan sumber data daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (system informasi administrasi kependudukan)

c) Motto pelayanan

“melayani dengan setulus hati”

d) Susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi

1) Susunan organisasi

Berdasarkan peraturan bupati kabupaten jayawijaya nomor 7 tahun 2008 dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil struktur organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten jayawijaya terdiri dari :

- a) Kepala;
- b) Sekretaris;
- c) Bidang;
- d) Kelompok jabatan fungsional;

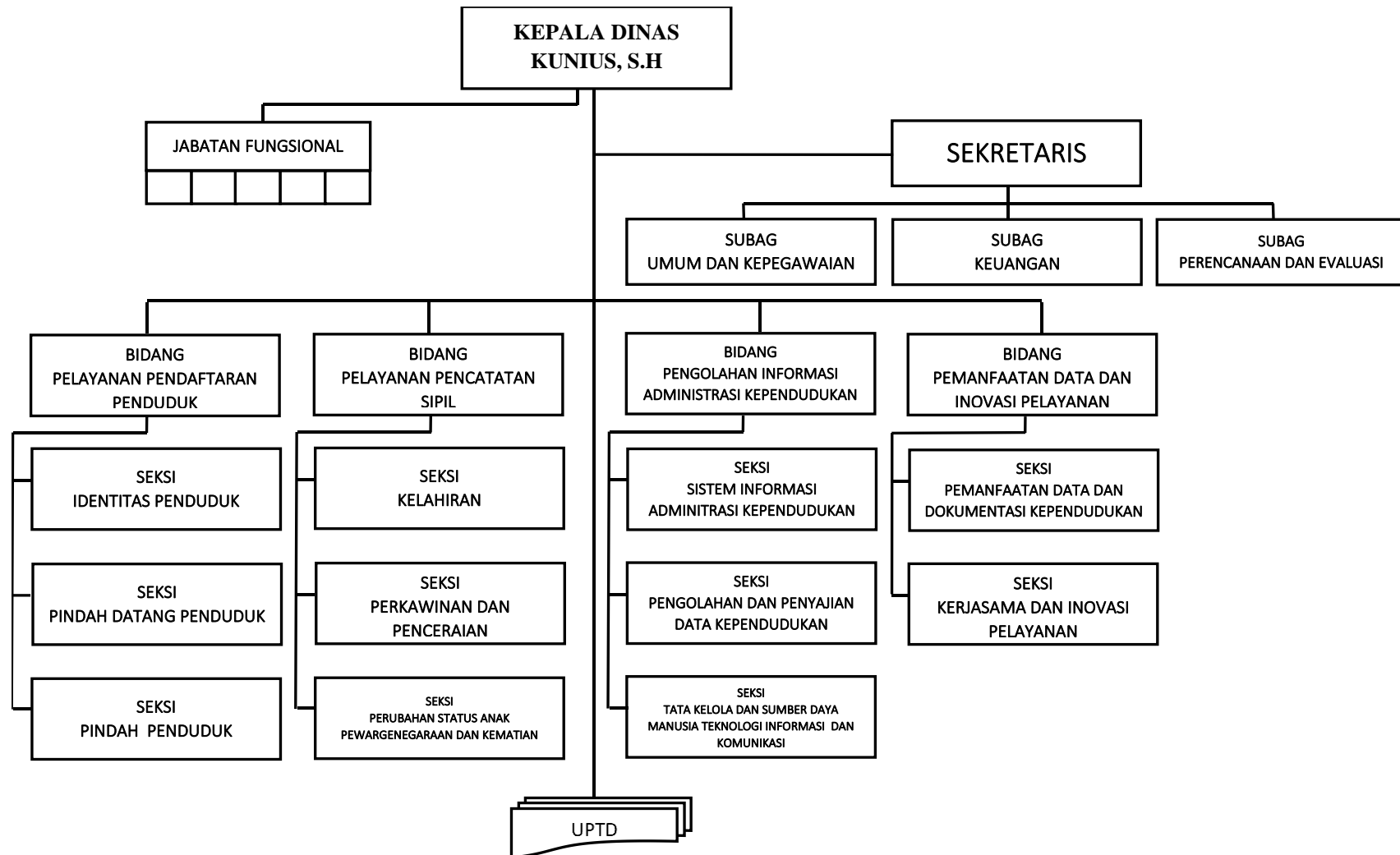
e) Susuna organisasi

Susuna organisasi kependudukan dan catatan sipil terdiri dari:

- 1) Kepala
- 2) Sekretaris membawahi:
  - Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - Sub bagian keuangan;
  - Bagian program
- 3) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk membawahi:
  - Seksi identitas penduduk;
  - Seksi mutase penduduk;
  - Seksi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- 4) Bidang pelayanan pencatatan sipil membawahi :
  - Seksi pencatatan kelahiran dan kematian;
  - Seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - Seksi mutase pencatatan sipil dan kewarganegaraan.
- 5) Bidang pengelolaan informasi kependudukan membawahi :
  - Seksi system dan teknologi informasi ;
  - Seksi pengolahan data informasi.
- 6) Bidang pengolahan dokumen kependudukan membawahi;
  - Seksi pengumpulan dan pengolahan dokumen;
  - Seksi pemerliharaan dan pelayanan dokumen.
- 7) UPT badan membawahi
  - Sub bagian tata usaha
- 8) Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan peraturan bupati kabupaten jayawijaya nomor 7 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipil adalah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, maka dapat digunakan struktur organisasi, sebagai berikut

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya**



*Sumber data : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya 2022*



### **a) Bidang Tugas Dan Unsur – Unsur Organisasi**

#### **1) Kepala**

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

#### **2) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan kepegawaian. Untuk meyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi, yakni :

- Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengolahan surat menyurat perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
- Pelaksanaan pengolahan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawian;**

#### **4) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekretaris dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan keuangan;**

5) Sub bagian program mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan rencana dan program evaluasi bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksanaan dinas.

**b) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran kartu keluarga, kartu tanda penduduk mutase penduduk dan identitas penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing. untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, sehingga teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan dan pendaftaran penduduk skala kabupaten;
- 2) Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system administrasi kependudukan;
- 5) Pematuan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- 6) Pembinaan dan pengembangan sumber data daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
- 7) Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

- 9) Seksi identitas penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian nomor induk kependudukan (NIK);
- 10) Seksi mutasi penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan petunjuk pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan, pemilihan berkas serta pengelolaan dalam proses mutasi penduduk;
- 11) Seksi identitas penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian nomor induk kependudukan (NIK);
- 12) Seksi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, menginventarisir kebutuhan blanko kartu identitas keluarga dan kartu tanda penduduk.

**c) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan dan penertiban akte kelahiran dan kematian, akte perkawinan dan perceraian, mutasi pencatatan sipil dan pokok kewarganegaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala bekala;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan catatan sipil;
4. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system administrasi kependudukan;
5. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan catatan sipil;
6. Pembinaan dan pengembangan sumber data daya manusia pengelola pencatatan sipil;
7. Pengawasan atau penyelenggaraan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan:
  - Seksi pencatatan kelahiran dan kematian mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi kegiatan pencatatan dan penertiban akte kelahiran dan kematian;
  - Seksi pencatatan perkawinan dan perceraian mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan bahan penyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pencatatan dan penertiban akte perkawinan dan perceraian;
  - Seksi mutase pencatatan sipil dan kewarganegaraan mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan mutase pencatatan sipil dan perubahan kewarganegaraan.

**d) Bidang Pengolahan Informasi Kependudukan**

Bidang pengolahan informasi kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengolahan informasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang pengolahan informasi kependudukan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan kebijakan pengolahan informasi administrasi kependudukan;
- 2) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan informasi;
- 3) Pemantuan dan evaluasi pengolahan informasi administrasi kependudukan;
- 4) Pembinaan dan pengembangan sumber data daya manusia pengolahan kependudukan;
- 5) Penagawasan dan pengolahan informasi administrasi kependudukan;
- 6) Pembuatan data statistic dan laporan dan serta memberikan pelayanan informasi;
- 7) Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
  - Seksi system dan teknologi informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengembangan system dan teknologi informasi;
  - Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi memperispakan bahan

penyusunan petunjuk dan pelaksanaan operasional kegiatan pengolahan data.

**e) Bidang Pengolahan Dokumen**

Bidang pengolahan dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan dan pelayan dokumen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang pengolahan dokumen mempunyai fungsi :

- Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pengumpulan dan pengolahan dokumen;
- Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pemeliharaan dan penyelenggaraan dokumen;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**f) Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Dokumen**

mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengumpulan dan pengolahan dokumen;

**g) Seksi Pemeliharaan Dan Pelayanan Dokumen**

mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan operasional kegiatan pemeliharaan dan pelayanan dokumen.

**h) Keadaan Pegawai**

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya diketahui keadaan dan jumlah pegawai yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya diuraikan, sebagai berikut :

### 1) Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13 orang
2.	Perempuan	8 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil 2022*

Berdasarkan table 4.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

### 2) Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Keadaan pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SMU	6 Orang
2.	Strata Satu	15 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 Orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil, 2022*

Berdasarkan table 4.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan strata satu lebih banyak di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

### 3) Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Keadaan pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.3 Di bawah ini:

**Tabel 4. 3 Keadaan Pengawai Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Staf	3 orang
2.	Kasi pengolahan dan penyaluran data kependudukan	1 orang
3.	Kasubag keuangan	1 orang
4.	Kasi tata Kelola dan SDM	1 orang
5.	Teknologo informasi dan komunikasi	1 orang
6.	Kasi system informasi administrasi kependudukan	1 orang
7.	Kasi kelahiran	1 orang
8.	Kasi pengolaan penduduk	1 orang
9.	Kasi pendataan penduduk	1 orang
10.	Kasi perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian	1 orang
11.	Kasubag umum & kepegawaian	1 orang
12.	Kasi pemanfaatan data & dokumentasi kependudukan	1 orang
13.	Kasi Kerjasama & inovasi pelayanan	1 orang
14.	Kasi perkawinan & perceraian	1 orang
15.	Kabid pemanfaatan data & pelayanan	1 orang
16.	Kabid pengolahan informasi administrasi kependudukan	1 orang
17.	Sekretaris (plt.kadis)	1 orang
18.	Tampa keterangan	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 Di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang memiliki jabatan sebagai staf ada 3 orang, tanpa keterangan 2 orang, sedangkan yang lain



dijabatan oleh setiap orang untuk setiap struktur yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 4) Keadaan Pegawai Berdasarkan Agama

Keadaan pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.4 di bawah ini :

**Tabel 4. 4 Keadaan Pengawai Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Kristen protestan	12 orang
2.	Katolik	5 orang
3.	Kristen	1 orang
4.	Islam	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil, 2022*

Berdasarkan table 4.4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, lebih banyak yang beragama Kristen protestan.

### 5) Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Keadaan pegawai kantpr kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.5 Di bawah ini :

**Tabel 4.5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat golongan	Jumlah
1.	Pengatur TK.I(II/d)	1 orang
2.	Pengatur muda TK.I (II/b)	1 orang
3.	Penata muda (III/a)	2 orang
4.	Penata (III/b)	1 orang
5.	Penata (III/c)	5 orang
6.	Penata TK.I (III/d)	7 orang
7.	Pembina (IV/a)	3 orang
8.	Pembina TK.I (IV/b)	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil, 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 Di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, didominasi oleh pegawai dengan pangkat/golongan penata TK.I (III.d).

### 6) Keadaab Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada table 4.6 Di bawah ini;

**Tabel 4. 6 Keadaan Pengawai Berdasarkan Masa Kerja**

No	Masa kerja	Jumlah
1.	0-5 Tahun	2 Orang
2.	6-10 Tahun	6 Orang
3.	11-15 Tahun	3 Orang
4.	16-20 Tahun	4 Orang
5.	21-25 Tahun	2 Orang
6.	26-30 Tahun	3 Orang
7.	31-35 Tahun	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

*Sumber data : kantor disdukcapil, 2022*

Bedasarkan table 4.6 Di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pegawai yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, lebih banyak dari pengawai dengan masa kerja 6-10 tahun.

## 2. Keadaan Informan

**Tabel 4. 7 Keadaan Infroman**

No	Nama Inisial	Pekerjaan	Jabatan	Alamat	Pendidikan
1.	KT	ASN	Kepala Dinas Kependudukan	Jalan Yos Sudarso	S1 (S.H)
2.	FH	ASN	Kabid Piak Dinas Kependudukan	Jalan Yos Sudarso	S1 (S,Kom)
3.	NH	ASN	Kasubag Keuangan	Jalan Yos Sudarso	S1 (S.Sos)
4.	SN	Guru	Operator	Sd Percobaan	S1 (S.Pd)
5.	FB	Avsec	Security Bandara	Jalan Trihora	SMA
6.	JI	ASN	-	Jalan Irian Atas	S1(S.AP)
7.	MK	Ibu rumah tangga	-	Jalan Irian Atas	D3 (Amd.Keb)
8.	HH	Swasta	-	Jalan Trihora	S1 (S.Sos)
9.	PI	Guru	Operator	Jalan Gatot Subroto	SMA
10	DN	Guru	Kepala Tata Usaha	Jalan Gatot Subroto	S1 (S.Sos)
11.	MA	Ibu Rumah Tangga	-	Jalan Irian Atas	SMA

*Sumber data : Data primer 2022*

### 3. Analisa Data

Dalam penelitian ini tentang implementasi kartu identitas anak di masa covid 19 yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan melalui hasil wawancara dengan informan yakni Kepala Dinas, Kabid Piak, Kasubag Kauangan, Avsec, Guru, Masyarakat Orang Tua (6 Orang) sebanyak 11 orang kemudian sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai berikut: hubungan organisasi, sumber daya, karakteristik dan kabilitas, faktor lingkungan.

#### a. Proses Implementasi Karu Idenitas Anak Di Kabupaten Jayawijaya

Kapan diterapkan kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya?

Wawancara dengan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bapak KT ,dimana beliau mengaakan :

“ 22 november 2019 kami sudah terapkan kartu identitas anak dikabupaten jayawijaya, kami juga sudah mengundang sekolah-sekolah untuk hadir dalam pembukaan program baru yang di hadiri oleh bupati jayawijaya”(wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30)

Diusia berapakah anak bisa mendapatkan kartu identitas anak?

Hasil wawancara dengan bapak KT sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Di bawah usia 16 tahun. Dan KIA juga ada dua macam yang pertama KIA yang berumur 0-5 tahun tidak memakai foto dan KIA yang berumur 5-16 tahun memakai foto 3x4” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah kartu identitas anak wajib di miliki oleh anak-anak ?

Hasil wawancara dengan bapak KT sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Iya Wajib dimiliki oleh anak-anak karena itu untuk kebutuhan mereka misalnya anak yang mau mendaftarkan sekolah, masuk rumah

sakit, belik tiket pesawat itukan memerlukan identitas mangkanya KIA sangat dibutuhkan oleh anak, untuk mendapatkan pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ada perbedaan KIA dengan KTP elektronik

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“Iya itu pasti ada kalau KIA di dalam kartu tidak memiliki chip sedangkan KTP elektronik sudah memiliki chip di dalamnya dan untuk ketebalan KIA dan KTP sama hanya saja yang membedakan KIA dan KTP, chip dan warna blangko kalua KTP biru dan KIA ping kemerahan” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 10.00-10.30).

Hasil wawancara dengan bapak JUN S.AP sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Sudah, pada saat saya mau membuat akta kelahiran anak saya, saya diberitaukan oleh salah satu pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak dan fungsi dari kartu ini sekarang kalau ada yang mau membuat akta kelahiran langsung dibuatkan kartu identitas anak bersamaan dengan akta kelahiran” (wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

Hasil wawancara dengan bapak JI sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Bagus sekali saya sangat mendukung program baru yang keluaran oleh dinas kependudukan karna adanya kartu ini saya tidak capek membawa kartu kelaurga untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit,daftar anak sekolah,belik tiket pesawat” (wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ibu sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?

Hasil wawancara dengan ibu MK sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau kartu ini saya sudah tau sejak saya di jawa, kalau di sana sudah wajib dimiliki oleh anak di bawah 16 tahun karna pemerintah di sana sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat” (wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 10.00-10.30).

Apakah tanggapan ibu mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak ?

Hasil wawancara dengan ibu MK sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Ow sangat bagus, saya mendukung sekali program ini, dengan adanya kartu identitas anak dapat memberikan anak menjadi lebih mandiri lagi contohnya seperti membuka rekening tabungan sendiri dan mendapatkan pelayanan rumah sakit tanpa bimbingan orang tua”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 10.00-10.30).

Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak.

Hasil wawancara dengan bapak HH sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak?

“Kartu identitas anak, saya Tau pas saya berada di Surabaya tahun 2018 kebetulan anak saya yang berumur 6 tahun bersekolah di sana dan di mintai kartu identitas anak sedangkan dinas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya belum melayani pencetakan kartu identitas anak pada tahun 2018. Tapi pada tahun 2019 dinas kependudukan sudah melayani pencetakan kartu identitas anak”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 11.00.11.30).

Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas ?

Hasil wawancara dengan bapak HH sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kartu ini sangat berguna sekali untuk anak saya karna dengan adanya kartu identitas anak ini saya dapat mudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan mendaftarkan sekolah serta membuka rekening untuk anak jadi anak lebih dapat mandiri”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 11.00-11.30).

Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak.

Hasil wawancara dengan bapak PI sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kartu identitas anak saya sudah puyah karna pada saat saya mau membuat akta kelahiran anak saya langsung dibuatkan kartu identitas anak nah dari situ saya baru tau tentang kartu ini”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 01.00-01.00).

Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas ?

Hasil wawancara dengan bapak PI sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya program ini bagus tetapi tidak ada sosialisasi kepada masyarakat oleh karena itu saya kaget juga pas dapat kartu identitas anak dan apa juga fungsi dari kartu ini”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 01.00-01.00).

Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?

Hasil wawancara dengan bapak Djamaluddin, S.Sos sebagai masyarakat mengatakan bahwa :



“Oow (KIA) kartu identitas anak itu saya puyah, kebetulan sodara saya kerja di dinas kependudukan dia menyarankan untuk membuat kartu identitas anak agar tidak repot – repot untuk membawa kartu keluarga ke sana kesini jadi dengan adanya kartu identitas anak saya Cuma foto copy saja kartu ini”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 02.00-02.30).

Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas ?

Hasil wawancara dengan bapak DN sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau tanggapan saya bagus saya masih belum paham dengan program ini tetapi fungsi dari kartu ini bagus untuk kami orang tua”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 02.00-02.30).

Apakah ibu sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?

Hasil wawancara dengan ibu MA sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau kartu ini saya sudah tau pas masih tinggal di makassar di sana kalau mau mendaftarkan sekolah anak itu sudah wajib memiliki kartu identitas anak tapi kalau di sini saya masih belum tau”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 03.00-03.30).

Apakah tanggapan ibu mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas?

Hasil wawancara dengan ibu MA sebagai masyarakat mengatakan bahwa :

“Bagus sekali adik dan saya juga mendukung program ini dengan adanya program ini anak saya lebih dapat mandiri dan mudah mendapatkan pelayanan”(wawancara tanggal 14 mei 2022 jam 03.00-03.30).

## **b. Hubungan Organisasi**

Apakah sudah ada kerja sama dengan dinas – dinas dalam menerapkan kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya?

Hasil wawancara dengan bapak KT sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Untuk sementara ini kami dari dinas kependudukan belum melakukan kerja sama dengan dinas – dinas kalau untuk pemberitahuan kepada sekolah kami sudah lakukan, di tahun ini kami ada mau kerja sama dengan dinas kependidikan mengenai program kartu identitas anak, sebelumnya ada anak mahasiswa dari yapis wamena mau melakukan pencetakan KIA sebanyak 22 anak untuk diserahkan di kampung tulima tetapi saat itu saya belum bisa hadir karna ada kegiatan lain” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

apakah dinas kependudukan telah melakukan kerja sama dengan pihak sekolah mengenai kartu identitas anak?

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“kalau kerja sama antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih belum ada sama sekali tapi untuk komunikasi mengenai kartu identitas anak sudah”(wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 10.00-10.30).

Apakah ada sosialisasi tentang program kartu identitas anak yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Hasil wawancara dengan bapak satria nurul huda sebagai operator Smp Negeri 1 wamena mengatakan bahwa :

“Kalau selama saya di sini masih belum ada sosialisasi kepada kami. Tetapi kalau mengenai kartu identitas anak kami sudah menggentahui dan kami juga sudah terapkan di smp 1” (wawancara tanggal 13 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ada sosialisasi tentang program kartu identitas anak yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Hasil wawancara dengan bapak FP sebagai Avsec Bandara Wamena mengatakan bahwa :

“Kalau semasa saya kerja di sini masih belum ada sosialisasi mengenai program ini. Tapi saya tau tentang program ini mengenai kartu identitas anak” (wawancara tanggal 13 mei 2022 jam 10.00-10.30).

### **c. Sumber Daya**

Apakah sumber daya manusi/fasilitas sudah memenuhi kebutuhan pencetakan KIA?

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“Kalau sumber daya manusia yang kami miliki sudah cukup untuk melakukan pencetakan KIA sesuai dengan SOP, sedangkan untuk sumber daya fasilitas yang kami miliki sudah cukup tetapi kadang kalau rusak kami harus membawah ke tukang service sama blanko yang sering habis “(wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 10.00-10.30).

Apakah sumber daya fasilitas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KIA?

Hasil wawancara dengan bapak NH sebagai kasubag keuangan mengatakan bahwa :

“Iya sudah cukup karna untuk pencetakan Kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya masih belum tinggi dan untuk printer, computer kami sudah cukup untuk melayani pencetakan KIA di jayawijaya” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 11.00-11.30).

Apakah kartu identitas anak sudah di terapkan di sekolah negeri 1 wamena?

Hasil wawancara Dengan Bapak SN Sebagai Operator Smp Negeri 1 Wamena mengatakan bahwa :

“Untuk persyaratan masuk sekolah kami juga menambahkan kartu identitas anak tetapi kami belum mewajibkan semua siswa – siswi untuk mempunyai kartu identitas anak karna sebagai besar masyarakat masih belum mengetahui kartu identitas anak” (wawancara tanggal 13 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah kartu identitas anak sudah di terapkan di bandara wamena ?

Hasil wawancara dengan Bapak FB Sebagai Avsec Bandara Wamena mengatakan bahwa :

“Kalau itu saya belum tau karna kami hanya pelaksana. Tetapi siapa saja yang mau masuk bandara harus menunjukkan identitas kalau anak-anak biasanya mereka menunjukan kartu pelajar ada juga yang menunjukan kartu identitas anak kami juga belum perna melihat kartu identitas anak tetapi pada saat pengecekan kartu identitas anak, kalau kartu ini dikeluarkan oleh dinas kependudukan” (wawancara tanggal 13 mei 2022 jam 10.00-10.30).

#### **d. Karakteristik Dan Kapabilitas**

Apakah penerapan kartu identitas anak (KIA) sudah merata di kabupaten jayawijya?

Hasil wawancara dengan bapak KT sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Iya sudah kami lakukan penerapan di 40 distrik”

(wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ada target dalam pencetakan kartu identitas anak (KIA) pertahun ?

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“iya di setia tahun pasti kami melakukan pencapaiannya target, di tahun 2019 kami target pembuatan KIA 5 kartu dan di tahun 2020 sebanyak

15 kartu dan seterusnya” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Mengapa jumlah pencetakan KIA di tahun 2019 sangat sedikit di bandingkan pada tahun 2020 yang melonjak tinggi ?

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“Di tahun 2019 mengapa pencetakan KIA sangat sedikit karena program kartu identitas anak pada saat launching itu pada tanggal 22 november 2019 itu kami masih melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan pengumpulan data di tahun 2019 dan di tahun 2020 kami sudah melakukan pencetakan oleh karena itu di tahun 2020 pencetakan KIA itu lebih banyak dari pada tahun 2019” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Berapa jumlah anak yang sudah mencetak kartu identitas anak (KIA), dan yang belum mencetak (KIA) di tahun 2021?

Hasil wawancara dengan bapak FH sebagai Kabid Piak mengatakan bahwa :

“Di tahun 2021 yang belum mencetak KIA bersekitaran 47.461 anak dari jumlah anak 0-16 tahun yang sekitaran 55.046 anak dan sudah mencetak KIA di tahun 2021 sekitaran 7.585 anak” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

#### **e. Faktor Lingkungan**

Apakah ada kendala saat diterapkan kartu identitas anak (KIA)?

Hasil wawancara dengan bapak KN sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Iya ada, seperti di tahun 2020 itu ada wabah covid 19 yang telah masuk di kabupaten jayawijaya maka penerapan kartu identitas anak di batasi sehingga kami tidak bisa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kartu identitas anak oleh karena itu hampir masyarakat yang ada di kabupaten jayawijaya tidak mengetahui KIA

dan apa fungsinya” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ada strategi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dalam menerapkan kartu identitas anak (KIA) di masa covid 19?

Hasil wawancara dengan bapak KT sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Strategi yang kami lakukan misalnya masyarakat yang mau membuat akta kelahiran. Kami langsung memberitaukan kepada masyarakat tentang kartu identitas anak dan apa fungsi dari kartu ini.

kalau ada masyarakat yang mau membuat akta kita langsung membuat kartu identitas anak bersamaan dengan akta kelahiran” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 09.00-09.30).

Apakah ada strategi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dalam menerapkan kartu identitas anak (KIA) di masa covid 19?

Hasil wawancara dengan NH sebagai kasubag keuangan mengatakan bahwa :

“Strategi yang kita lakukan itu mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, biasanya kalau ada masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran itu langsung kita buat KIA bersamaan dengan keluarnya akta kelahiran dan kami juga memberikan pengertian dan fungsi dari kartu ini” (wawancara tanggal 12 mei 2022 jam 11.00-11.30).

#### 4. Pembahasan

##### a. Implementasi kartu identitas anak di Kabupaten Jayawijaya

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi kartu identitas anak di masa covid 19 dengan aspek yang diteliti adalah hubungan organisasi, sumber daya, karakteristik dan kapabilitas, faktor lingkungan.

Implementasi kartu identitas anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan (**Peraturan**

**Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak)**

Tujuan program ini untuk pemerintah menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-16 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Pembuatan KIA untuk anak usia 0-5 tahun kurang satu hari

1. Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya
2. KK asli orangtua/wali
3. KTP-el asli orangtua

Pembutan KIA untuk anak usia 5-17 Tahun kurang satu hari

1. Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya
2. KK asli orangtua/wali
3. KTP-el asli orangtua
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 X 3 ( 2 lembar)

Adapun masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak

tersebut kartu identitasnya digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Karenanya kartu identitas anak (KIA) yang diprogramkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara. Pendaftaran kartu identitas anak (KIA) dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota tempat tinggal tetap anak. Pemohon akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan oleh pemerintah pusat dengan tata cara:

1. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran KIA;
2. Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.



**b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Jayawijaya.**

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.:

**1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah semua elemen atau indikator yang ikut dalam mendorong, melancarkan, menunjang, atau mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai. Faktor pendukung yang di maksud di sini adalah segala yang menjadi pendukung implementasi kartu identitas anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi faktor pendukung yaitu adalah sumber daya yang kita miliki cukup memadai, baik itu sumber daya manusia yang cukup kompeten, sumber dana sumber daya fasilitas yang cukup baik sehingga dapat diproses pembuatan kartu identitas anak dengan baik ditambah lagi sebelum melakukan kartu identitas anak kami juga sudah membertaukan kepada sekolah agar hadir dalam pembukaan program mengenai kartu identitas anak.

Adapun kerja sama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan mahasiswa UNAIM dalam melaksanakan program kartu identitas anak di kampung Tulima dimana pada saat itu mahasiswa yang berada di kampung Tulima yang sedang melaksanakan KKN (kuliah kerja nyata) telah bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pembuatan kartu identitas anak.

Pada saat penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) di kampung Tulima Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya yang dihadiri oleh Bapak Rektor UNAIM dan Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil dalam penyerahan kartu identitas anak kepada masyarakat kampung Tulima.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya menilai faktor yang mendukung pembuatan kartu identitas anak adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas komunikasi dan sumber daya dana sehingga proses pembuatan kartu identitas anak berjalan dengan baik.

## 2. **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah segala hal yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, dalam kata lain pengacau atau tertahannya pencapaian tujuan organisasi dikarenakan oleh tidak berjalan lancarnya beberapa elemen. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara faktor yang menjadi penghambat yaitu adanya wabah covid 19 yang telah menyebar luas di Kabupaten Jayawijaya maka penerapan kartu identitas anak dihentikan sementara waktu maka hampir masyarakat Jayawijaya hampir semua belum mengetahui program kartu identitas anak dan belum mengerti apa fungsi dari kartu identitas anak.

Dari hasil wawancara di atas maka dikemukakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan kartu identitas anak di Kabupaten Jayawijaya yaitu wabah covid 19. Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor dalam program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya didapatkan signifikan. hubungan organisasi yang

belum pernah dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya.

berdasarkan observasi oleh penelitian ditemukan bahwa faktor penghambat yaitu faktor lingkungan dimana komitmen antara pegawai untuk mencapai target 10.000 blangko keping kartu identitas anak (KIA) belum tercapai. Hal ini dikarenakan penyebaran covid 19 yang mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan daerah serta sekolah-sekolah menjadi tutup dan hanya melakukan pembelajaran lewat daring ke siswa.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu Geografis dimana medan yang ada di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 40 Distrik dan 328 kampung tidak dapat ditempuh melalui Transfortasi darat dan Sebagian Distrik hanya dapat ditempuh melalui Trasfortasi udara seperti Distrik Taelarek yang hanya dapat ditempuh melalui helikopter,

berikut tabel yang sudah mempunyai KIA di Kabupaten Jayawijaya.

**Tabel 4. 8 Yang Mempunyai Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021**

KODE_WNI	NAMAKEC	2021		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
91.02.01	WAMENA	2655	2557	5212
91.02.03	KURULU	37	46	83
91.02.04	ASOLOGAIMA	24	20	44
91.02.12	HUBIKOSI	106	90	196
91.02.15	BOLAKME	17	11	28
91.02.25	WALELAGAMA	46	35	81
91.02.27	MUSATFAK	14	10	24
91.02.28	WOLO	7	12	19
91.02.29	ASOLOKOBAL	43	57	100
91.02.34	PELEBAGA	16	11	27
91.02.35	YALENGGA	16	10	26

91.02.40	TRIKORA	5	5	10
91.02.41	NAPUA	42	37	79
91.02.42	WALAIK	8	9	17
91.02.43	WOUMA	87	73	160
91.02.44	HUBIKIAK	275	266	541
91.02.45	IBELE	19	13	32
91.02.46	TAELAREK	5	4	9
91.02.47	ITLAY HISAGE	18	13	31
91.02.48	SIEPKOSI	22	21	43
91.02.49	USILIMO	21	17	38
91.02.50	WITA WAYA	19	17	36
91.02.51	LIBAREK	17	11	28
91.02.52	WADANGKU	9	9	18
91.02.53	PISUGI	32	26	58
91.02.54	KORAGI	4	6	10
91.02.55	TAGIME	21	14	35
91.02.56	MOLAGALOME	4	6	10
91.02.57	TAGINERI	9	11	20
91.02.58	SILO KARNO DOGA	16	15	31
91.02.59	PIRAMID	18	23	41
91.02.60	MULIAMA	31	29	60
91.02.61	BUGI	12	8	20
91.02.62	BPURI	5	2	7
91.02.63	WELESI	20	12	32
91.02.64	ASOTIPO	29	31	60
91.02.65	MAIMA	34	21	55
91.02.66	POPUGOBA	9	9	18
91.02.67	WAME	8	6	14
91.02.68	WESAPUT	113	119	232
JUMLAH		3893	3692	7585

*Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

*Kabupaten Jayawijaya 2022*

Dari hasil data yang didapatkan bahwa Distrik Bpuri jumlah pencetakan KIA sangat sedikit dari 40 distrik lainnya faktor yang dapat menghambat implementasi kartu identitas anak yaitu Geografis medan yang ada di Kabupaten Jayawijaya tidak semua Distrik dapat ditempuh melalui transportasi darat.

**a. Hubungan Organisasi**

Dari hasil wawancara beberapa informan yaitu: kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kabid piak, guru smp negeri 1 Wamena, avsec bandara Wamena. Bahwa implementasi kartu identitas anak sudah Merata di kabupaten Jayawijaya sebanyak 40 distrik khususnya di kampung Tulima yang sudah diserahkan langsung pada masyarakat.

tetapi masih belum melakukan kerja sama dengan dinas-dinas yang terkait dengan anak di bawah 16 tahun dan masih belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jayawijaya terkait dengan program kartu identitas anak

**b. Sumber daya**

Dari hasil wawancara beberapa informan yaitu: kabid piak, kasubag keuangan, bahwa sumber daya yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil cukup baik untuk implementasi kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya baik dari sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang cukup untuk pencetakan KIA sesuai dengan SOP dinas kependudukan .

**c. Karakteristik Dan Kapabilitas**

dari hasil wawancara beberapa informan yaitu: Kepala dinas. Kabid piak, kasubag keuangan dengan adanya komitmen antara petugas dinas kependudukan dalam pencetakan KIA dan pencapaian target untuk meningkatkan pencetakan KIA disetiap tahunnya.

**d. Faktor Lingkungan**

Dari hasil wawancara beberapa informan yaitu: kepala dinas, kabid piak, kasubag keuangan dan beberapa informan implementasi kartu identitas anak dapat mempengaruhi faktor lingkungan seperti adanya wabah covid 19 yang telah

menyebar luas di kabupaten jayawijaya sejak tahun 2020 dan itu berdampak kepada penerapan program kartu identitas anak yang tidak dapat di sosialisasikan kepada masyarakat dan kerja sama antara dinas kependudukan dengan dinas-dinas lain Adapun Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya.

Implementasi kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya berbeda dengan kabupaten lombok timur, selain itu disdukcapil kabupaten lombok juga telah mencanangkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis seperti pusat perbelanjaan, toko buku, tempat bermain taman hiburan, dan lain sebagainya. Dengan menunjukan KIA anak mendapatkan harga khusus dengan potongan harga dan beberapa kemudahan lainnya. sedangkan di kabupaten jayawijaya untuk melaksanakan kerja sama dengan dinas dan mitra bisnis masih belum dilaksanakan oleh dinas kependudukan oleh karena itu masyarakat kabupaten jayawijaya masih banyak yang belum mengenal Kartu identitas anak

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai Implementasi kartu identitas anak di Masa Covid 19 pada Kabupaten Jayawijaya dapat di nilai dengan empat indikator yaitu sumber daya, karakteristik, sumber daya, faktor lingkungan serta faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kartu identitas anak (KIA), maka di Simpulkan Implemetasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jayawijaya yaitu :

1. **Hubungan Organisasi**, berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan hubungan organisasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya mengenai kartu identitas anak sudah baik. Pemberitahuan kepada sekolah – sekolah dasar terkait dengan kartu identitas anak, sementara sosialisasi kepada masyarakat masih belum di karenakan adanya wabah covid 19 yang telah menyebar di Kabupaten Jayawijaya. Dan adapapun juga kerja sama dengan mahasiswa UNAIM dalam penyerahan kartu identitas anak di kampung Tulima.
2. **Karakteristik Dan Kapabilitas**, berdasarkan hasil penelitian terkait karakteristik dan kapabilitas oleh dinas kependudukan dan pencaatatan sipil kabupaten jayawijaya cukup baik, di mana penerapan kartu identitas anak dilakukan secara komitmen dan pencapaian target setiap tahunnya.
3. **Sumber Daya Organisasi**, berdasarkan hasil penelitian terkait sumber dadya dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya, baik sumber daya manusia yang kompeten denga pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasilitas berupa alat, pemotretan, alat cetak dan blangko yang

tersedia cukup memadai. Identitas anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jayawijaya adalah sumber daya yang kompeten.

4. **Faktor lingkungan**, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor lingkungan kurang baik, karena adanya wabah covid 19 penerapan (KIA) dibatasi sehingga penerapan kartu identitas anak berdampak kepada masyarakat yang kurang tau dengan adanya kartu identitas anak oleh karena itu kartu identitas anak masih asing terdengar oleh masyarakat.
5. **Faktor Pendukung**, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten jayawijaya yaitu komunikasi, sumber daya organisasi. Karakteristik dan kapabilitas dan hubungan organisasi.
6. **Faktor penghambat**, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten jayawijaya yaitu faktor lingkungan seperti faktor social, faktor wabah covid 19, faktor geografis maka dari itu proses implementasi kartu identitas anak di Kabupaten Jayawijaya belum tepat sasaran.

## **B. Saran**

Upaya agar implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Jayawijaya dapat terealisasi dengan baik, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jayawijaya agar lebih giat melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui kartu identitas anak yang sudah dibuka oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan kerja sama dengan dinas Pendidikan untuk membantu proses sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk melakukan proses sosialisasi agar masyarakat dapat lebih paham akan fungsi dari kartu identitas anak itu sendiri.



2. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 16 tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public bagi anak. Selain itu juga akan menjadi prasyarat bagi anak yang akan mendaftar sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta. In *Alfa Beta*.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Setia Pustaka .
- Kusumanegara. (2010). Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta. In G. Media.
- Mustari, S. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. In *Leutika Prio*.
- Purwanto, E. S. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia. *Gava Media*.
- Sulisyastuti, P. &. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta. In *Media, Gava*.
- Wahab, A. S. (2012). Analisi Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta. In *Bumi Aksara*.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus: Edisi Dan Revisi Terbaru, Yogyakarta. *Center For Academic Publishing Service*.

## DOKUMEN

- Windi Dwi Arista, W. S. (2019, Februari). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3 No. 1(2581-2424), 56-66.
- Kasriati. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi Kabupaten Goa. *Skripsi*, 1-115.
- Maria Mercilin Irenes, E. D. (2019). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitaas Anak (Kia). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8 No. 4(2442-6962), 272-277.
- Noer, K. U. (2021, April). Asesmen Implementasi Kebijakan Kertu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Anak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 No 4(2548-1398), 1-11.
- Nur Rohman, E. W. (2021, April). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2614-2945), 1-12.
- Sulastini. (2021). Implementasi Program Kartu Idetitas Anak Di Kabupaten Lombok. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2 No. 2(2722 - 242x), 1-11.
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Entang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006. (Tentang Administrasi Kependudukan).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. (Tentang Kartu Identitas Anak). 1-11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019. (Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil).

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara : Rabu 12 Mei 2022

Lokasi wawancara : Kantor

Nama informasi : KENIUS TABUNI

Alamat informasi : Jalan Yos Sudarso Wamena

Pendidikan : S1 (S.H)

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Kepala Dinas

#### **PERTANYAAN**

1. Kapan diterapkannya kartu identitas anak (KIA) di kabupaten jayawijaya?
2. Di usia berapakah anak bisa mendapatkan kartu identitas anak (KIA)?
3. Apakah kartu identitas anak (KIA) wajib di miliki oleh anak-anak?
4. Apakah ada kendala saat diterapkannya kartu identitas anak (KIA)?
5. Apakah sudah ada kerja sama dengan dinas – dinas dalam menerapkan kartu identitas anak di kabupaten jayawijaya?
6. Apakah penerapan kartu identitas anak (KIA) sudah merata di kabupaten jayawijaya?
7. Apa strategi yang di lakukan oleh dinas kependudukan dalam menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) di masa Covid 19?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara : Rabu 12 Mei 2022

Lokasi wawancara : Kantor

Nama informasi : FRANK HANSEN

Alamat informasi : Jalan Yos Sudarso

Pendidikan : S1 (S.Kom)

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Kabid Piak

**PERTANYAAN**

1. Berapakah jumlah anak yang sudah mencetak (KIA), dan yang belum mencetak (KIA) di tahun 2021?
2. Mengapa jumlah pencetakan (KIA) di tahun 2019 sangat sedikit di bandingkan pada tahun 2020 yang melonjak tinggi?
3. Apakah ada perbedaan (KIA) dengan KTP elektronik?
4. Apakah sumber daya fasilitas sudah memenuhi kebutuhan pencetakan (KIA)?
5. Apakah ada target dalam pencetakan (KIA) pertahun?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara : Rabu 12 Mei 2022

Lokasi wawancara : Kantor

Nama informasi : NANANG

Alamat informasi : Jalan Yos Sudarso

Pendidikan : S1 (S.Sos)

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Kasubag Keuangan

**PERTANYAAN**

1. Apakah ada kendala saat diterapkannya kartu identitas anak (KIA)?
2. Apa strategi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dalam menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) di masa Covid 19?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara : Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara : Kantor

Nama informasi : SATRIA NURUL HUDA

Alamat informasi : Jalan Sd Percobaan

Pendidikan : S1 (S.Pd)

Pekerjaan : Guru

Jabatan : Operator

**PERTANYAAN**

1. Apakah Dengan Adanya Kartu Identitas Anak Ini Dapat Membantu Sekolah Untuk Menginput Data Siswa-Siswi?
2. Apakah Kartu Identitas Anak Sudah Di Terapkan Di Sekolah Negeri 1 Wamena?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara : Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara : Kantor

Nama informan : FEBRI PURNAMA WALALAYO

Alamat informan : Jalan Trikora

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Avsec

Jabatan : Security Bandara

**PERTANYAAN**

1. Apakah Di Bandara Wamena Telah Menerapkan Kartu Identitas Anak?
2. Apakah Tanggapan Anda Mengenai Kartu Identitas Anak ?



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Rumah

Nama informasi : JUNAIDI

Alamat informasi :Jalan Irian Atas

Pendidikan : S1 (S.Ap)

Pekerjaan : ASN

Jabatan : -

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak?
2. Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Rumah

Nama informasi : MARTIN KHOERUROH

Alamat informasi :Jalan Irian Atas

Pendidikan : D3 (Amd. Keg)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : -

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah ibu sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak?
2. Apakah tanggapan ibu mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Toko

Nama informasi : HAYATUL HIDAYAT

Alamat informasi :Jalan Trikora

Pendidikan : S1 (S.Sos)

Pekerjaan : Pegusaha

Jabatan : -

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?
2. Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Sekolah

Nama informasi : PANTRI

Alamat informasi :Jalan Gatot Subroto

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Guru

Jabatan : Operator

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?
2. Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Sekolah

Nama informasi : DJAMALUDDIN

Alamat informasi :Jalan Gatot Subroto

Pendidikan : S1 (S.Sos)

Pekerjaan : Guru

Jabatan : Kepala Tata Usaha

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak?
2. Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
(IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK )**

Hari/ tanggal wawancara :Kamis 13 Mei 2022

Lokasi wawancara :Rumah

Nama informasi : MAYA

Alamat informasi :Jalan Gatot Subroto

Pendidikan :SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : -

**PERTANYAAN**

Apakah bapak

1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan tentang kartu identitas anak ?
2. Apakah tanggapan bapak mengenai program yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai kartu identitas anak?



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM)  
YAPIS WAMENA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Jalan Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511 Kotak Pos 148  
E-mail: lppmunaim@gmail.com Website : www.lppm\_unaimwamena.ac.id

Nomor : 4.29/021/141011/2022  
Lampiran : 1 ( satu ) Rangkap Proposal  
Perihal : **Pengantar Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth  
**Kepala BAPPEDA**  
**Kabupaten Jayawijaya**  
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana dan pengambilan data untuk Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas nama:

Nama Lengkap : **Ponco Wijak Sono**  
NIM : 2018 10 071  
Semester : **VIII ( Delapan )**  
Bidang Kajian : Ilmu Pemerintahan  
Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dimasa Covid-19 Kabupaten Jayawijaya**  
Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya

Untuk keperluan tersebut di atas, maka mohon kiranya dapat diberi ijin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul Skripsi dimaksud di atas. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wamena, 20 April 2022

Kepala LPPM

**H. Muhammad Ali, S.Sos., M.Si**  
NIDN 1417056701

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, di Wamena;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Gedung Wenehule Huby Lat. 3 Kantor Dinas Otonom Jl. Yos Sudarso - Wamena

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ ~~1247~~ / Bappeda/ 202

Menunjuk Surat : Yayasan Pendidikan Islam DiTanah Papua Cabang Kabupaten jayawijaya  
Nomor:: 4 .229/ 021/ 1410/ 2022 .  
Surat keputusan Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Jaywijaya Nomor : 267 / 125 / BAPPEDA / 2017 Tentang Prosedur Pelayanan  
Perizinan Survey, Penelitian , Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, Study  
Mengingat Kelayakan, Peraktek Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Jayawijaya

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya memberikan izin kepada :

Nama Lengkap : Ponco Wijak Sono  
Nim : 2018 10071  
Semester : VIII (Delapan )  
Bidang kajian : Ilmu Pemerintahan  
Prog Studi : Ilmu Pemerintahn  
Judul Skripisi : Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dimasa Covid-19 KabupatenJayawijaya

Berdasarkan pengamatan dan manfaat penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan mengadakan penelitian di Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan penelitian agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala/ pimpinan tempat penelitian dilaksanakan;
2. Dalam melakukan penelitian wajib menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya c.q Bappeda Kabupaten Jayawijaya setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu – waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan izin ini tidak boleh di salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Wamena
3. Arsip





**PEMERINTAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Jl. Yos sudarso, wamena

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :470/90/DISDUKCAPIL/2022

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

NAMA : KENIUS TABUNI S.H  
NIP : 197003041997111001  
PANGKAT : (IV/B)  
JABATAN :KEPALA DINAS  
INSTANSI :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
ALAMAT :Jln. Yus Sudarso, Wamena

Dengan Ini Menerangkan Bahwa

NAMA : PONCO WIJAK SONO  
NIM : 201810071  
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK DI MASA  
COVID 19 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Adalah Benar Telah Melakukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir (Skripsi)  
Dengan Judul "*Implementasi Kartu Identitas Anak Di Masa Covid 19 Di Kabupaten  
Jayawijaya*"

Sejak Tanggal 22 April 2022 Sampai 23 Mei 2022 Dan Telah Membahas Meteri Hasil  
Penelitiannya Dengan Kami, Sehingga Segala Data Dan Informasi Yang Diperoleh  
Semata-Mata Untuk Keperluan Tugas Akhir Studi Dan Bukan Untuk Dipublikasikan  
Ke Publik.

Wamena 23 Mei 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

  
KENIUS TABUNI S.H  
NIP. 197003041997111001

**WAWANCARA DENGAN PENGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA**





## WAWANCARA DENGAN GURU DI SMP NEGERI 1 WAMENA



## WAWANCARA DENGAN AVSEC/SECURITY BANDARA WAMENA



## WAWANCARA DENGAN ORANG TUA/ MASYARAKAT







## KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 0-5 TAHUN

PROVINSI PAPUA  
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

NIK : 9102010104210001

Nama Lengkap : AKHTAR KHOURY ZHAFRAN  
Tempat/Tgl. Lahir : WAMENA, 01-04-2021  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Nomor Kartu Keluarga : 9102011502120025  
Nama Kepala Keluarga : HAYATUL HIDAYAT  
Nomor Akta Kelahiran : 9102-LU-06042021-0001  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JLN. TRIKORA

RT/RW : 001/002  
Desa/Kelurahan : WAMENA KOTA  
Kecamatan : WAMENA  
Berlaku s/d : 31-03-2026

JAYAWIJAYA, 06-04-2021  
Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kannoria Siagian, SH  
NIP. 196512041994032006



## KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 5-16 TAHUN

PROVINSI PAPUA  
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

NIK : 9102013108120001

Nama Lengkap : ALIM KHOURY ZHAFIER  
Tempat/Tgl. Lahir : WAMENA, 31-08-2012  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Nomor Kartu Keluarga : 9102011502120025  
Nama Kepala Keluarga : HAYATUL HIDAYAT  
Nomor Akta Kelahiran : 9102-LU-03092012-0011  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JLN. TRIKORA

RT/RW : 001/002  
Desa/Kelurahan : WAMENA KOTA  
Kecamatan : WAMENA  
Berlaku s/d : 30-08-2029

JAYAWIJAYA, 21-09-2020  
Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kannoria Siagian, SH  
NIP. 196512041994032006





## **BIODATA PENULIS**



Ponco Wijaksono adalah anak keempat dari lima bersaudara, berasal dari suku madura yang lahir dan dibesarkan di Wamena, 29 Januari 1998. Menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Athahiriyah Yapis wamena tahun 2010, sekolah menengah pertama di Smp negeri 1 wamena tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah Smk Sidratul Munthana Yapis wamena tahun 2016. Pengalam pertama setelah menyelesaikan SMK yaitu saya bergabung di salah satu perusahaan penerbangan cargo di wamena pada tahun 2017 dan aktif sebagai pemegang manifest, selanjutnya pada tahun 2018 saya mengundurkan diri dari penerbangan dan keinginan kuat untuk muncul dalam benak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, hingga akhirnya saya resmi menjadi keluarga besar sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik (STISIP) Wamena di tahun 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Alhamdulillah sekarang kampus ini berubah menjadi Universitas yakni Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena (UNA'IM) Yapis Wamena.